

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebijakan pemerintah orde baru terhadap Tionghoa untuk menjaga integrasi bangsa Indonesia adalah dengan menerapkan kebijakan asimilasi. Asimilasi itu dilakukan oleh orde baru terhadap etnis Tionghoa karena etnis Tionghoa dinilai oleh orde baru sebagai etnis yang masih berbau asing. Sehingga perlu dilakukan adanya pribumisasi dengan meninggalkan budaya Tionghoa secara penuh.

Pemerintah orde baru mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif terhadap Tionghoa, mulai dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini dipicu oleh konsep *nation* yang dianut oleh Soeharto terhadap bangsa Indonesia ini dan juga karena adanya pemberontakan PKI pada 30 September 1965.

Kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap Tionghoa itu ternyata tidak membuat integrasi bangsa Indonesia semakin kuat dan solid. Karena adanya kecemburuan sosial yang disebabkan adanya kesenjangan ekonomi. Hal ini membuat semakin menguatkan sentimen masyarakat pribumi terhadap Tionghoa, yang akhirnya berujung disintegrasi, dan berujung pada lengsernya Soeharto, yang dibarengi dengan krisis moneter yang melanda Indonesia.

5.2 Saran

Permasalahan antara etnis Cina dengan warga pribumi agar dapat terpelihara dengan baik, sudah selayaknya penyebutan warga negara pribumi dan non-pribumi segera dihilangkan. Tanamkan pula benih-benih pendidikan bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultural yang meliputi keberagaman budaya, agama, ras,

etnis, suku, dan bahasa yang satu sama lain harus hidup bersama tanpa ada konflik untuk menjaga keharmonisan Indonesia ke arah yang lebih baik. Sudah saatnya pula kita menghilangkan rasa perbedaan diantara kita dan menghapuskan pendiskriminasi antar masyarakat Indonesia, bahwa diskriminasi hanya akan membuat persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia semakin berkurang. Kita seharusnya menganggap kita sama sebagai masyarakat Indonesia.